

ABSTRAK

**KONSISTENSI KEWENANGAN DAERAH PASCA DITERBITKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2018 TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP
OTONOMI DAERAH**

BETHANO A. RARSINA

1487013

Dengan adanya pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di dalam bidang perizinan berusaha, namun di dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan, terkait dengan kewenangan daerah di bidang pelayanan perizinan berusaha, sebagaimana pembagian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan di bidang pelayanan perizinan.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang disertai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini pun menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik kualitatif.

Pemerintah di dalam upaya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dalam regulasi mengenai pelayanan perizinan berusaha, diupayakan dapat menjamin kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsisten di dalam memberikan pelayanan perizinan. Pemerintah Dalam membuat regulasi, diupayakan adanya sinkronisasi antara kewenangan Pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dengan kewenangan lembaga online single submission yang dilakukan melalui pemerintah pusat yang dinilai bertentangan dengan kewenangan daerah jika ditinjau dari prinsip otonomi daerah.

Kata Kunci : Kewenangan Daerah, Akibat, Otonomi Daerah, sistem Online Single Submission

ABSTRACT

With the implementation of the online system single submission (oss) intended as an effort to the government in increase performance and the quality of public services in in the field of licensing trying to, but in its implementation contrary to local authority autonomous to set and take care of own affairs government and local community purpose in accordance with the purpose legislation, relating to local authority in the field of licensing service trying to, as power-sharing from government central to local authorities in the management in the field of licensing service.

The research was conducted in a juridical manner normative. that includes descriptive The approach used in this researchh is the statute approach. The kind of data used in secondary data research is accompanied with the law primary, secondary and tertiary. Data collection in research is using a technique. qualitative study literature to technique.

The government in an effort to increase performance and the quality of services in trying to licensing regulations about trying to the provision of licenses , efforts should be made to guarantee the legal certainty to the entrepreneurs and consistent in in the delivery of perzinan .The government in made their own regulations , the authorities had been proposing the existence of synchronization between regional government has the authority to permit service with the authority online institutions single submission that was conducted via the central government that considered to be in contradiction with local authority if kept on a constant review from the principle of regional autonomy .

Keywords:

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan.....	19
E. Kerangka Pemikiran.....	20
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II Tinjauan hukum undang-undang Nomot 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam kewenangan daerah dalam mengatur perizinan berusaha ditinjau dari otonomi daerah	33
A. Pemerintahan Daerah	33
B. Kewenangan Pemerintah Daerah	41
C. Otonomi Daerah.....	49
D. Kewenangan daerah dalam izin	57
BAB III TINJAUAN MENGENAI PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH no. 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK DALAM MENGATUR PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.....	70
A. Penyelengaraan Pelayanan Publik dalam Perizinan.....	70
B. Kedudukan Peraturan Pemerintah dalam Hierarkis Peraturan Perundang-undangan	78

C. Perizinan Berusaha yang Diatur di dalam Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik	84
D. Tinjauan Hukum Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) di Indonesia.	
92	
E. Mekanisme Pendaftaran melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	96
BAB Iv ANALISIS KONSISTENSI KEWENANGAN DAERAH PASCA DITERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHYN 2018 TENTAng pelayanan perizinan terintegrasi elektronik dikaitkan dengan undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditinjau dari prinsip otonomi daerah .	102
A. Analisis Kosistensi Kewenangan Daerah Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik mengenai Kewenangan Daerah Dikaitkan dengan Prinsip Otonomi Daerah dalam Mengatur Perizinan.....	102
B. Akibat Hukum Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah....	112
BAB V	121
kesimpulan dan saran	121
A. Kesimpulan	121